

## KAJIAN POSTKOLONIALISME DALAM TEKS DRAMA “JANGAN MENANGIS INDONESIA” KARYA PUTU WIJAYA

**Ine Septianesi**

Fakultas Pendidikan Bahasa/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
IKIP SILIWANGI

Korespondensi penulis: [inseptianesi@gmail.com](mailto:inseptianesi@gmail.com)

**Errika Anandita**

Fakultas Pendidikan Bahasa/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
IKIP SILIWANGI

Email: [erikaanandita8@gmail.com](mailto:erikaanandita8@gmail.com)

**Ulpa Sadiyah**

Fakultas Pendidikan Bahasa/Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia,  
IKIP SILIWANGI

Email: [ulpaulpasadiyah@gmail.com](mailto:ulpaulpasadiyah@gmail.com)

**Abstract.** *This drama Jangan Menangis Indonesia talks a lot about colonialism or colonialism, where there is no injustice, the rulers are rampant which makes the people oppressed arbitrarily, the former colony, is Indonesia really independent? With so much arbitrariness and oppression? So the researcher took the postcolonialism study theory to be the fulcrum in this research. From the word postcolonialism, we can guess that this theory discusses how the state of Indonesia after the colonial period was. The purpose of this study is to analyze more clearly the state of Indonesian society in the drama text Jangan menangis Indonesia by using a postcolonial approach, the method used is descriptive qualitative research and The results of the research in the drama entitled Jangan menangis Indonesia, namely, First how the colonial hegemony is carried out by government officials, Second, gender hegemony is a form of power treatment of men against women, Third is the form of injustice felt by Indonesian society and the last is resistance. Indonesian people to liberate Indonesia and defend justice.*

**Keyword :** *Postcolonialism, Dramatic Text*

**Abstrak.** Drama Jangan Menangis Indonesia ini banyak membicarakan tentang penjajahan atau Kolonialisme, dimana-mana tidak ada ketidakadilan, penguasa sudah merajalela yang membuat rakyat ditindas semena-mena, negara bekas jajahan, apakah Indonesia telah benar-benar merdeka? Dengan masih banyaknya kesewenang-wenangan dan penindasan?. Maka peneliti mengambil teori kajian postkolonialisme untuk dijadikan titik tumpu dalam penelitian ini. Dari kata postkolonialisme ini kita bisa menebak bahwa teori ini membahas tentang bagaimana keadaan Indonesia sesudah masa penjajahan. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis lebih jelas lagi keadaan masyarakat Indonesia pada teks drama Jangan Menangis Indonesia dengan menggunakan pendekatan postkolonialism, metode yang

---

Received Februari 07, 2022; Revised Maret 2, 2022; April 22, 2022

\* Ine Septianesi, [inseptianesi@gmail.com](mailto:inseptianesi@gmail.com)

digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan hasil penelitian dalam drama yang berjudul *Jangan Menangis Indonesia* yaitu, Pertama bagaimana hegemoni penjajahan yang dilakukan oleh para aparat pemerintahan, Kedua Hegemoni gender merupakan bentuk perlakuan kekuasaan para kaum laki-laki terhadap perempuan, Ketiga bentuk ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia dan yang Terakhir merupakan perlawanan masyarakat Indonesia untuk memerdekakan Indonesia dan membela keadilan.

**Kata kunci :** Postkolonialisme, Teks Drama

## **1. PENDAHULUAN**

Sebagai salah satu bagian dari genre sastra, drama memiliki keunikan tersendiri bila dibandingkan dengan genre sastra lainnya yakni puisi dan prosa. Jika puisi maupun prosa (cerpen, novel, novelet, dan sebagainya) hanya ditulis oleh pengarang untuk dibaca tanpa harus dipertunjukkan atau dipentaskan di atas panggung pertunjukan sebagaimana dalam drama maupun teater (meski tidak menutup kemungkinan ada karya-karya dari para penyair maupun prosais yang dipertunjukkan di atas panggung maupun difilmkan).

Menurut Ferdinand Brunetierre, drama adalah suatu karya sastra yang disampaikan dengan aksi atau gerakan dan melahirkan keinginan bagi yang melihatnya. Drama adalah jenis karya sastra dimana penampilan fisiknya memperlihatkan secara verbal adanya dialog antar tokoh, Budianta dkk (2002).

Dalam naskah drama *Jangan Menangis Indonesia* digambarkan bahwa kondisi bangsa Indonesia pada saat itu, yakni, dipenghujung era Presiden Soeharto lengser dan memasuki era reformasi (Presiden BJ Habibi-Abdurahman Wahid-Megawati Soekarno Putri) menuju era demokrasi (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) permasalahan yang ada di negeri ini (Indonesia) malah semakin kacau-balau. Berbagai hal beruntun menerpa tak putus-putus. Mulai dari korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, kecurangan, bencana alam, demam berdarah, busung lapar, uang politik, kemerosotan pendidikan, kehancuran rohani, kaum perempuan banyak disiksa ditindas dijahanami, dan keadilan diinjak-injak atas nama kebenaran.

Karena drama *Jangan Menangis Indonesia* ini banyak membicarakan tentang penjajahan atau Kolonialisme, dimana-mana tidak ada ketidakadilan, penguasa sudah merajalela yang membuat rakyat ditindas semena-mena, negara bekas jajahan, apakah Indonesia telah benar-benar merdeka? Dengan masih banyaknya kesewenang-wenangan dan penindasan? Maka peneliti mengambil teori kajian postkolonial untuk dijadikan pisau

bedah dalam penelitian ini. Dari kata postkolonial ini kita bisa menebak bahwa teori ini membahas tentang peristiwa sesudah kolonialisme atau generasi kemerdekaan dan bisa juga membahas dampak-dampak yang ditimbulkan setelah penjajahan. Kata postkolonial tidak hanya mengacu pada pengertian ‘sesudah’ kolonial atau era kemerdekaan, melainkan kondisi-kondisi yang ditinggalkannya, sejak awal terjadinya kolonialisasi dan dampak-dampak yang ditimbulkannya Ratna dalam[1].

Poskolonialisme umumnya didefinisikan sebagai teori yang lahir sesudah kebanyakan negara-negara terjajah memperoleh kemerdekaannya. Makaryk dalam Faruk [1] mendefinisikan postkolonial sebagai kumpulan strategi teoretis dan kritis yang memiliki asumsi untuk mempersoalkan posisi subjek kolonial dan pasca kolonial.

Poskolonialisme ini membahas tentang hegemoni yang terdapat di dalam drama tersebut. Hegemoni adalah kemenangan kelas yang berkuasa yang didapatkan melalui mekanisme konsensus berbagai kekuatan sosial politik. Hegemoni berlangsung ketika masyarakat bawah termasuk kaum proletar sudah menerima dan meniru cara hidup, cara berpikir, dan pandangan kelompok elit yang mendominasi dan mengeksploitasi mereka.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Teori Postkolonialisme**

Postkolonialisme merupakan teori yang mengkaji hubungan karya sastra dengan sejarah, atau lebih tepatnya dengan masa kolonialisme penjajahan di suatu negara. Secara etimologi, postkolonialisme terdiri dari tiga morfem yaitu post-, kolonial, dan -isme. Post yang artinya pasca, kolonial berarti sifat penjajahan suatu bangsa atau bangsa lain, dan isme artinya paham, aliran, atau pemikiran. Dari ketiga gabungan morfem yang disusun menjadi satu kata dapat disimpulkan bahwa poskolonialisme adalah sebuah pendekatan yang menghubungkan tentang pasca kolonial.

Di dalam buku [2] mengemukakan bahwa kajian postkolonialisme, dengan sendiri tidak akan melupakan aspek-aspek kolonial, yaitu “penjajah” dan “terjajah”, keduanya tidak hanya terkait dengan masa lalu, melainkan juga berhubungan dengan “penjajah” dan “terjajah” di dunia ketiga. Jadi, dalam kajian postkolonialisme, perlu melihat representasi historis, dan rentetan akar peristiwa tersebut ke dunia ketiga (postkolonialisme). Kata “post” disini perlu dimaknai luas, yaitu “setelah” kolonial.

Menurut pandangan Spivak dalam [2] memandang bahwa studi sastra kolonialisme dapat mengaitkan dengan masalah *subaltern studies*. Artinya, studi tentang masyarakat yang tertekan harus bicara, harus mengambil inisiatif, dan menggelar aksi atas suara mereka yang terbungkam. Paham semacam ini sudah banyak mewarnai dunia cipta sastra, tidak sedikit karya sastra era kolonial ini mengungkapkan masalah *subaltern*, karena ketertindasan kaum *subaltern* ini selalu menjadi obsesi pengarang. Korban-korban penindasan kolonial dan pemberontakan anti kolonial, akan menjadi sasaran peneliti. Teori *subaltern* ini pertama kali dicetuskan oleh antonio gramsci dalam tulisan-tulisannya tentang hegemoni budaya.

Selain itu, dapat dikemukakan pula bahwa teori postkolonialisme memiliki arti sangat penting, dimana teori ini mampu mengungkap masalah-masalah tersembunyi yang terkandung dibalik kenyataan yang pernah terjadi, dengan beberapa pertimbangan yaitu: Pertama, secara definitif, postkolonialisme menaruh perhatian untuk menganalisis era kolonial. Postkolonialisme sangat sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yang merdeka baru setengah abad. Jadi, masih sangat banyak masalah yang harus dipecahkan, bahkan masih sangat segar dalam ingatan bangsa Indonesia. Kedua, postkolonialisme memiliki kaitan erat dengan nasionalisme, sedangkan kita sendiri juga sedang diperhadapkan dengan berbagai masalah yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bertanah air. Teori postkolonialisme dianggap dapat memberikan pemahaman terhadap masing-masing pribadi agar selalu mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan, kepentingan golongan diatas kepentingan pribadi. Ketiga, teori postkolonialisme memperjuangkan narasi kecil, menggalang kekuatan dari bawah sekaligus belajar dari masa lampau untuk menuju masa depan. Keempat, membangkitkan kesadaran bahwa penjajahan bukan semata-mata dalam bentuk fisik, melainkan psikologis.[1]

## **2.2. Teks Drama**

Kata drama berasal dari bahasa Yunani “draomai” yang berarti berbuat, belaku, bertindak, atau bereaksi dan sebagainya (Harymawan,1988 dalam [3]). Adapun istilah lain drama berasal dari kata drame, sebuah kata yang berasal dari bahasa Perancis yang diambil oleh Diderot dan Beaumarchaid yaitu drama bermaksud untuk menjelaskan lakon-lakon mereka tentang kehidupan kelas menengah. Jadi, pengertian drama adalah jenis sastra

berupa lakon yang ditulis dengan dialog-dialog yang memperhatikan unsur-unsur dengan gerak atau perbuatan yang akan dipentaskan di atas panggung. [3]

Kata “drama” masuk ke dalam perbendaharaan bahasa Indonesia berasal dan dibawa oleh kebudayaan Barat[4] . Di tanah asal kelahiran drama, yaitu Yunani, drama timbul dari suatu ritual pemujaan terhadap para dewa. Kata “drama” berasal dari kata dran (bahasa Yunani) yang menyiratkan makna to do atau to act [4].

Menurut Nurhayati (2019) dalam [5] drama dapat diartikan sebagai suatu cerita yang berisi rangkaian kehidupan suatu tokoh yang di dalamnya terdapat konflik. Kusumawati (2013) dalam [5] Drama adalah bentuk karya sastra yang menggambarkan kehidupan dengan menyampaikan pertikaian dan emosi melalui perlakuan dan dialog.

### **2.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Clara, dkk. Dengan judul penelitian “Kajian Postkolonial Dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis“. Penelitian ini membahas tentang Postkolonial dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik studi pustaka. Terdapat unsur-unsur di dalam teori Postkolonial yakni mimikri, hegemoni dan konsep barat-timur dimana tokoh dalam novel ini mengalami mimikri, hegemoni dan konsep barat-timur yang dilihat dari bagaimana gaya berbicara, berpakaian, bersikap, gaya hidup dan cara berpikirnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis dengan menggunakan teori postkolonial. Teknik analisis data yang digunakan analisis deskriptif kualitatif ini adalah membaca dan memahami novel, membuat sinopsis, mengidentifikasi, mengklasifikasi, menganalisis dan mengkaji, dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemikiran yang terkonsep pada budaya Barat menjadikan seluruh aspek kehidupan Hanafi menjadi kebarat-baratan. (2) Mimikri yang dilakukan oleh tokoh Hanafi dilihat dari gaya hidup, bahasa, tingkah laku, sikap dan cara berpikir yang menjadi kebarat-baratan, dan (3) Pemberontakan Hanafi terjadi karena adanya kekuasaan atau hegemoni pada budaya dan adat bangsa Timur. [6]

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang kami teliti yaitu, pada penelitian terdahulu karya sastra yang menjadi bahan penelitian merupakan karya sastra novel sedangkan, pada penelitian kami, karya sastra yang menjadi bahan penelitian yaitu

karya sastra teks drama. Selain karya sastra unsur penelitiannya pun sedikit berbeda, yaitu pada penelitian terdahulu memunculkan konsep barat-timur, sedangkan pada penelitian kami tidak ada konsep tersebut, namun lebih pada bagaimana menyimpulkan kejadian dalam teks drama ini sesuai dengan kenyataan yang dialami masyarakat Indonesia pada masa orde baru dan awal era reformasi.

### **3. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan postkolonialisme. Sumber data dalam penelitian ini merupakan teks drama karya Putu Wijaya yang berjudul *Jangan Menangis Indonesia*. Data dalam penelitian ini merupakan dialog-dialog dalam teks drama tersebut. Aspek yang diteliti mencakup, hegemoni penjajah kepada yang terjajah, hegemoni gender, perlawanan kaum terjajah, mimikri, dan hibriditas pada teks drama *Jangan Menangis Indonesia*. Teknik yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik studi pustaka, dengan menganalisis data-data sesuai dengan metode yang dipakai dengan cara membaca dan memahami teks drama, mengidentifikasi, menganalisis, mengkaji, dan menarik kesimpulan.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1. Hegemoni Penjajahan**

Hegemoni dapat diartikan sebagai kekuasaan. Menurut richards dan schmidt (2002) dalam[7] mendeskripsikan bahwa hegemoni adalah dominasi dari kelompok yang berkuasa terhadap ekonomi sosial, politik, budaya, dan ideologi dari suatu masyarakat atau antar masyarakat.

Pada masa transisi pemerintahan Presiden Soeharto dan pada masa awal memasuki Era Reformasi, Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari penjajahan, masih ada hegemoni kekuasaan antara pemerintah dan masyarakat, penjajah dan pribumi, atau antar sesama masyarakat sekalipun. Di era ini negara Indonesia memang sudah dinyatakan merdeka, namun hegemoni tetap ada. Hal ini, disebabkan oleh adanya mimikri (peniruan), yang mana mimikri disini terpengaruhi oleh ambivalensi (adanya dua pandangan berbeda), sebagian orang ingin mempertahankan perbedaan, sedangkan yang lainnya menghargai penjajah.[2]

Dalam teks drama jangan menangis Indonesia ada kutipan yang menjadi bukti adanya hegemoni pada masa pasca kolonial, yaitu sebagai berikut:

JENDRAL:

Brengsek! Konyol! Pemalas! Bodo kebo! Dasar pribumi! Gelo sia!

Begitu saja tidak becus! Mengangkat kardus seperti mengangkat langit. Semprul! Ayo jangan digondeli. Kerja bukan cari untung! Angkat! Dasar budak! Gotongroyong! Maunya kok menelan. Dasar kemaruk! Otak udang! Angkat bangsat! Kuntulanak.

Lihat sendiri ini negeri kacau. Manusia-manusia tidak memenuhi syarat. Begini mau merdeka? Berdiri saja tidak bisa. Ini mau mendirikan negara Tahi kerbau! Nggak usah merdeka, belajar jadi budak dulu!

Pada kutipan dialog di atas ini, dapat dijelaskan bahwa pada jaman dahulu penjajah memperlakukan pribumi sebagai orang-orang yang lemah, karna pada masa dahulu minimnya pendidikan bahkan pengetahuan membuat pribumi menjadi sangat lemah, sehingga para penjajah dapat dengan mudah mudah untuk memperbudak mereka.

MUNIR:

Habis aku gerah Pak. Di mana-mana ada ketidakadilan. Di mana-mana berserakan ketidakbenaran. Di mana-mahna rakyat ditindas semena-mena. Penguasa sudah merajalela, menindas rakyat yang memiliki negeri ini. Harusnya mereka menjadi abdi, tapi malah mereka yang kenyang sendiri, memperbudak dan menjahanami rakyat. Di mana letak kebenaran. Di mana letak demokrasi. Mana itu kerakyatan dan keadilan sosial serta peri kemanusiaan yang digembar-gemborkan.

Setelah kemerdekaan dan disahkannya pancasila sebagai dasar negara, pada masa itu masyarakat masih merasakan ketidakadilan dimana-mana. Bahkan pemerintah sendiri belum bisa menangani secara penuh hal-hal semacam itu, adapun beberapa pejabat yang hanya mementingkan dirinya sendiri. mereka meniru para penjajah terdahulu, yang mana jika mereka berada dikursi pejabat negara, mereka bisa dengan mudah mengendalikan masyarakat dan mengambil apa yang mereka mau.

AJUDAN:

Ya sudah, kalau mereka maunya begitu, Jendral? Ingat fasilitasnya.

.....

JENDRAL:

Kalau begitu aku boleh dapat fasilitas dong seperti Wakil-Wakil Rakyat itu dong?

.....

JENDRAL:

Rumah mewah?

.....

JENDRAL:

Konsesi penebangan hutan ?

.....

JENDRAL:

Jaminan kesejahteraan seumur hidup?

.....

JENDRAL:

Gaji naik?

Dari kutipan dialog jendral ini menjelaskan bahwa para pejabat hanya tergiur dengan harta dan tahta bukan pujian bagaimana cara mereka membangun dan menjalankan roda pemerintahan yang adil bagi seluruh masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup dengan nyaman. Pada abad 21 ini masih sering ditemui ketidakadilan yang di buat pemerintah, namun pada masa ini masyarakat Indonesia sudah bisa melawan atau menyuarakan keadilan.

#### **4.2. Hegemoni Gender**

Hegemoni gender merupakan bentuk perlakuan kekuasaan para kaum laki-laki terhadap kaum perempuan. Pada masa penjajahan kaum perempuan selalu dikuasai oleh kaum laki-laki yang mana perempuan selalu menjadi alat sebagai pemuas nafsu dan memandang perempuan sebagai kaum yang lemah. Pada jaman dahulu harga diri perempuan masih sangat kurang dihargai. Seiring perkembangan waktu dan jaman saat ini



telah banyak undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan sehingga kaum perempuan tidak dapat direndahkan oleh kaum laki-laki.

DALANG:

Inilah kenyataan di depan mata kita sekarang setiap hari. Kaum perempuan disiksa ditindas dijahani. Keadilan diinjak-injak atas nama kebenaran. Tapi waktu kita bertindak mau menolong, malah kita yang dituduh sebagai biang kerok. Bingung aku sekarang. Coba pikir.

PEREMPUAN:

Di rumahku ada 20 kepala yang semua menggantungkan isi perutnya kepada badanku ini, tahu? Kalau ada yang menyentuh badanku baru mereka makan. Jadi tiap malam paling sedikit mesti ada 21 orang menjarah badanku, karena perutku juga perlu makan! Bagaimana kalau sampai aku kena AIDS?.

Pada masa terdahulu perempuan tidak pernah mendapatkan keadilan sendiri dari pemerintah secara hukum, untuk melindungi mereka dari kejahatan-kejahatan yang selalu menimpa mereka. Selama itu mereka harus bisa bertahan untuk keluarga mereka khususnya anak-anak mereka, bahkan tidak sedikit dari mereka yang menjual diri hanya untuk menghidupi keluarga mereka. Namun, kebanyakan dari mereka sama sekali tidak mendapatkan perilaku yang baik dari kaum laki-laki. Mereka yang merasa iba dan ingin membela pun malah disalahkan dengan tuduhan yang tidak benar.

#### **4.3. Bentuk ketidakadilan**

Pada masa pemerintahan Presiden Soeharto, mengusung pemerintahan otoriter. pemerintahan otoriter ini merupakan pemerintahan yang menitik berat pada seluruh kebijakan pemimpin, apapun yang diputuskan harus dipatuhi oleh masyarakat.

DALANG (Digumamkan Dengan Tembang):

Berbagai hal beruntun menerpa tak putus-putus. Krisis ekonomi, suhu politik meninggi, huru-hara, teror bom, tsunami, gempa bumi, sar, flue burung, demam berdarah, kejahatan moral, narkoba, judi, korupsi, ke tidak berdayaan hukum, kejahatan para pemimpin, kasus-kasus yang mencederai hak azasi manusia. Risau, bingung, was-was, semua mendambakan kehidupan yang lebih baik. Tangan gelagapan berpegangan mencoba

bertahan agar tak terjadi kebangkrutan apalagi kemusnahan. Tapi di celah yang kecil, masih terlihat, terdengar dan terasa sebuah harapan apabila kita bersedia untuk menerima, belajar, ngeh, kemudian membalikkan kekalahan menjadi kemenangan masih ada sebuah janji.

Pada masa orde baru masyarakat dihadapkan dengan berbagai macam kesulitan, banyak orang baranggapan bahwa kesulitan ini muncul karena pemerintahan Presiden Soeharto. Memang pada saat Presiden Soeharto menghadiri pertemuan Hak Asasi Manusia di Thailand. Dalam forum itu, Soeharto menyatakan RUU Hak Asasi Manusia yang dicanangkan PBB tidak bisa diterapkan di negara-negara Asia. Jenderal tangan besi itu menjelaskan, di Asia warga tak bisa bebas mengkritik pemimpinnya, beda dengan budaya Barat.

Soeharto juga menekankan bahwa warga negara wajib menunjukkan rasa hormat pada pemimpin mereka, sebagaimana anggota keluarga pada kepala keluarga.

**MUNIR:**

Habis aku gerah Pak. Di mana-mana ada ke tidakadilan. Di mana-mana berserakan ke tidak benaran. Di mana-mana rakyat ditindas semena-mena. Penguasa sudah merajalela, menindas rakyat yang memiliki negeri ini. Harusnya mereka menjadi abdi, tapi malah mereka yang kenyang sendiri, memperbudak dan menjahanami rakyat. Di mana letak kebenaran. Di mana letak demokrasi. Mana itu kerakyatan dan keadilan sosial serta perikemanusiaan yang digembar-gemborkan.

Setelah masa kemerdekaan yang dipimpin oleh Presiden Soekarno beralih ke era kepemimpinan Presiden Soeharto, pancasila dan undang-undang dasar negara memang sudah disahkan. Namun, masyarakat belum merasakan bagaimana penerapan dasar negara itu. Keadilan sosial bahkan tidak mereka rasakan. Masyarakat pada masa itu hanya ingin hidup dengan adil dan tenang, namun para pemerintah yang seharusnya membuat mereka hidup dengan adil malah melakukan sebaliknya.

#### 4.4. Bentuk Perlawanan

Saat jaman penjajahan masyarakat Indonesia selalu berjuang untuk memerdekakan negara Indonesia, mereka harus berkorban dengan jiwa raga mereka agar bisa memerdekakan negeri indah ini.

SESEORANG:

Setiap menjelang tujuh belas Agustus (bisa diganti) aku selalu teringat kepada seorang pemuda yang dengan gagah berdiri di depan penjabat-pejabat Jepang. Tanpa memegang sebarang kertas, ia berbicara langsung menjelaskan apa yang ditanyakan oleh para pejabat itu, yang tidak bisa dijawab oleh pembicara-pembicara sebelumnya. Ia menjelaskan bahwa negeri yang dihuni oleh 70 juta jiwa ini, dengan segala perbedaannya dalam banyak hal. Berbeda agama, berbeda suku bangsa, bahasa, adat-istiadat dan kebiasaan, namun bisa hidup berdamping sebagai saudara. Negeri ini tidak memerlukan persiapan yang tuntas untuk mewujudkan cita-citanya, karena kalau menunggu sampai siap, tidak akan pernah menjadi kenyataan. Kita hanya memerlukan sebuah jembatan emas yang memberikan sebuah ruang berpikir dan bergerak yang bebas. Kita memerlukan sebuah kebebasan politik. Sebuah kemerdekaan!

Presiden Soekarno, dengan lantang membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia di depan para penjajah Jepang kala itu. Meskipun negara Indonesia sedang dalam masa penjajahan dan masih banyak sekali konflik yang bermunculan. Presiden Soekarno tetap bersikeras memerdekakan Indonesia. Karena beliau beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia tidak memerlukan persiapan yang lebih matang lagi untuk itu.

MUNIR:

Tidak boleh hanya setuju, harus ikut menyerbu! Bersuara dan melawan! Semuanya harus menyerang.. Kita harus berkomplot menjadi kekuatan raksasa untuk menaklukkan ke tidakadilan. Kemanusiaan sudah rendah sekali martabatnya di negeri ini. Nyawa manusia terlalu murah. Kita sudah bangkrut sebagai mahluk beradab. Para pemimpin tidak bisa dipercayai. Para intelektual berkhianat. Semua orang mencari enak perutnya sendiri. Hukum sudah kalah. Pembunuhan spiritual setiap hari berlangsung dengan keji. Pendidikan merosot. Anak-anak mabuk, kena narkoba dan keblinger. Negeri ini dalam keadaan kritis. Tolong!

Setelah masa kemerdekaan era orde lama masih banyak konflik-konflik yang menimpa Indonesia dari dalam dan luar Indonesia. Masyarakat biasa merasakan amat sangat penderitaan dari konflik-konflik tersebut, sehingga mereka menyalahkan aparat pemerintahan. Mereka selalu menuntut meminta keadilan terhadap segala sesuatu, karena memang yang mereka rasakan hanya ketidakadilan.

Menurut pandangan peneliti ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat adalah dampak dari penanganan konflik-konflik di Indonesia, yang memang masalahnya harus mengorbankan beberapa pihak terkait, namun keputusan presiden pun memang sudah dipikirkan matang-matang dan itu sudah ada tujuan tertentu.

#### **4.5. Hibriditas dan Mimikri Dalam Teks Drama**

Hibriditas merupakan campuran budaya antara penjajah dan pribumi. Dalam teks drama ini dapat dilihat mimikri bahwa penggambaran sebagian pribumi masih pada kultur para penjajah, hal ini terlihat dari bagaimana hegemoni kekuasaan masih terasa sangat jelas, perlakuan terhadap kaum perempuan, serta masih adanya konsep superioritas dan inferioritas.

### **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil metode penelitian postkolonialisme dalam teks drama Jangan Menangis Indonesia ini dapat diambil kesimpulan yaitu dimana pada masa transisi pemerintahan presiden Soeharto dan pada masa awal memasuki Era Reformasi, Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari penjajahan, masih ada hegemoni kekuasaan pemerintah dan masyarakat, penjajah dan pribumi, atau antar sesama masyarakat sekalipun.

Meskipun pada saat itu pancasila dan undang-undang dasar negara memang sudah disahkan. Namun, masyarakat belum merasakan bagaimana penerapan dasar negara itu. Keadilan sosial bahkan tidak mereka rasakan. Masyarakat pada masa itu hanya ingin hidup dengan adil dan tenang, namun para pemerintah yang seharusnya membuat mereka hidup dengan adil malah melakukan sebaliknya.

Berdasarkan hasil analisis keseluruhan aspek cerita dalam naskah drama Jangan Menangis Indonesia, maka ditemukan sikap perjuangan ingin memperbaiki segala permasalahan yang menimpa Indonesia. Dalam naskah drama tersebut terlihat segala permasalahan yang terjadi itu sudah sangat menyengsarakan rakyat Indonesia terutama bagi kalangan bawah.

## 5.2. SARAN

Meskipun penulis menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan artikel ini, akan tetapi pada kenyataannya masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki penulis, hal ini dikarenakan masih minimnya pengetahuan menulis.

Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat diharapkan sebagai bahan evaluasi untuk ke depannya, sehingga bisa terus menghasilkan penelitian dan karya tulis yang bermanfaat bagi banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. E. Anggraini, “Posmodernisme Dan Poskolonialisme Dalam Karya Sastra,” *Pujangga*, vol. 4, no. 1, p. 59, 2019, doi: 10.47313/pujangga.v4i1.500.
- [2] S. Endraswara, *Metode Penelitian Sastra*, 1st ed. Yogyakarta: CAPS (Center for Academic Publishing), 2013.
- [3] H. Isnaini, *Tafsir Sastra: Pengantar Ilmu Hermeneutika*. Bandung: Pustaka Humaniora, 2021.
- [4] T. Milawati, “Peningkatan kemampuan anak drama dan menulis teks drama melalui model pembelajaran somatis auditiv visual intelektual (SAVI),” *J. Penelit. Pendidik.*, vol. 14, no. 2, pp. 70–78, 2011.
- [5] N. E. Daeli and S. Frisca, “Bahasa Indonesia,” *J. Kesehat.*, vol. 8, no. 1, pp. 33–41, 2020, doi: 10.35913/jk.v8i1.166.
- [6] H. Isnaini, “Komunikasi Tokoh Pingkan dalam Merepresentasikan Konsep “Modern Meisje” Pada Novel Hujan Bulan Juni ” *MUKASI: Jurnal Ilmu Komunikasi* vol. Volume 1, Nomor 2, pp. 164-172 2022, doi: <https://doi.org/10.54259/mukasi.v1i2.867>.
- [7] P. Supini, R. T. Sudrajat, and H. Isnaini, “Pembelajaran Menulis Teks Drama Dengan Menggunakan Metode Picture And Picture,” *Parol. (Jurnal Pendidik. Bhs. dan Sastra Indones.*, vol. 4, no. 1, pp. 15–22, 2021, [Online]. Available: <https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/parole/article/view/5664>
- [8] D. S. Clara, Y. Chanafiah, and E. Agustina, “Kajian Postkolonial Dalam Novel Salah Asuhan Karya Abdoel Moeis,” *J. Ilm. KORPUS*, vol. 4, no. 2, pp. 157–165, 2020, doi: 10.33369/jik.v4i2.9514.

- [9] H. Isnaini, "Upacara "Sati" dan Opresi Terhadap Perempuan Pada Puisi "Sita" Karya Sapardi Djoko Damono: Kajian Sastra Feminis," *Dialektika: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya*, vol. Vol. 8, No. 2, pp. 112-122, 2021.
- [10] M. S. Simatupang, "Hegemoni Kekuasaan dalam Novel 'Bumi Manusia' Karya Pramoedya Ananta Toer: Suatu Kajian Postkolonial," *Dialektika*, vol. 2, no. 1. pp. 60-85, 2013.